

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal utama dalam kegiatan pembangunan suatu negara. Sebuah negara dapat dikatakan maju apabila memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul. Pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu kewajiban bagi setiap Negara. Upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi suatu kegiatan yang penting karena sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek terpenting dalam meningkatkan *Human Development Indeks* (HDI) suatu Negara. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia (SDM), maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran, kemandirian, dan ketahanan suatu Negara. Hal tersebut diperkuat oleh apa yang diungkapkan Suryadi (2012, hlm. 1) bahwa:

Berdasarkan pengalaman sejumlah Negara, tidak ada faktor yang lebih penting dari upaya mewujudkan bangsa yang maju selain membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi warga negaranya. Pengembangan kualitas SDM merupakan suatu investasi yang menjadi tanggung jawab mutlak suatu Negara-bangsa (*nation state*). Investasi SDM selalu diarahkan pada dua tujuan utama, yaitu untuk membentuk ketahanan (*survival*), dan menghantarkan bangsa agar tumbuh dan berkembang (*development*) menuju kedewasaan, keadilan dan kemakmuran .

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap Negara di dunia. Menurut Danim (1995, hlm. 44) beliau mengatakan bahwa:

Indikator kualitas sumber daya manusia (SDM) meliputi kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan) yaitu (1) memiliki kemampuan pada jenjang yang lebih tinggi, (2) memiliki tingkat ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja, baik yang di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, (3) memiliki penguasaan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa ibu, dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing, (4) memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada kenyataannya tingkat HDI (*Human Development Index*) Indonesia masih jauh tertinggal dari Negara-negara maju di dunia. Dikutip pada berita harian online *m.tempo.co* pada 16 Desember 2015 bahwa, peringkat Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) bersifat stagnan. *United Nations Development Programme* (UNDP) mencatat nilai Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) Indonesia pada tahun 2014 sebesar 0,684. Dengan nilai tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-111 dari 188 negara. Analisis Senior Pembangunan Manusia, SDGs, dan Pengentasan Kemiskinan UNDP, Harry Seldadyo Gunardi, mengatakan peringkat tersebut ditempati Indonesia selama tiga tahun berturut-turut sejak 2012 (Erlangga, 2015).

Menurut *Human Development Report 2015* menjelaskan bahwa nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia pada tahun 2015 adalah 0.684-. Dengan hasil tersebut menempatkan Indonesia pada ranking 110 dari 188 negara di dunia (<http://hdr.undp.org/country-notes/IDN.pdf>). Peringkat IPM Indonesia tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang berada pada ranking 111 dari 188 negara di dunia. Namun posisi Indonesia tersebut masih tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN seperti Singapura yang berada di peringkat 18, Brunei peringkat 30, Malaysia 64, dan Thailand di peringkat 87 (<https://id.wikipedia.org>). Posisi tersebut membuat Indonesia berada di level pembangunan manusia menengah kategori negara berkembang.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada tahun 2015 berada pada peringkat empat dari enam provinsi di pulau Jawa. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Jawa Barat yaitu 69.50 pada tahun 2015 dan masih tertinggal bila dibandingkan dengan provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Banten. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Jawa Barat masih cukup tinggi. Provinsi Jawa Barat memiliki presentase penduduk miskin sebesar 9.53% pada semester pertama tahun 2015 dan mengalami peningkatan kenaikan jumlah penduduk miskin pada semester kedua tahun 2015 menjadi 9.57%. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan provinsi Banten dan DKI Jakarta yang memiliki penduduk miskin sebanyak 5.90% dan 3.93% pada semester pertama tahun 2015 serta 5.75% dan 3.61% pada semester kedua tahun 2015 (bps.go.id).

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Barat masih cukup tinggi. Data jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan pada semester kedua tahun 2015. Bila dibandingkan dengan provinsi Banten dan Jakarta jumlah penduduk miskin di dua wilayah tersebut mengalami penurunan di semester kedua tahun 2015. Hal tersebut harus menjadi perhatian dari pemerintah dalam menurunkan angka penduduk miskin dalam upaya meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di provinsi Jawa Barat. Penduduk miskin sudah sepatutnya menjadi sorotan negara dan masyarakat untuk diberdayakan dan ditangani seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor. 13 tahun 2011 pasal (1) ayat (2) yang berbunyi “Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara” dan ayat (3) yang berbunyi “Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial”.

Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yaitu melalui pendidikan. Pendidikan merupakan suatu investasi yang cukup penting dalam membangun suatu Negara, seperti amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa pendidikan merupakan upaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan Undang-undang Nomor. 20 tahun 2003 pasal (1) ayat (1) yang berbunyi “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. Setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan yang layak, hal tersebut telah tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal (5) ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” dan ayat (5) yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Setiap warga Negara memiliki hak yang sama yaitu memperoleh pendidikan yang layak untuk mengembangkan potensi yang ada pada dalam diri setiap warga Negara yang nantinya akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga bagi Negara sebagai modal pembangunan bangsa.

Upaya dalam pemerolehan pendidikan yang layak dapat ditempuh melalui berbagai jalur pendidikan. Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal (13) ayat (1) dijelaskan bahwa “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Salah satu jalur pendidikan yaitu jalur pendidikan nonformal. Definisi dan fungsi dari diselenggarakannya Pendidikan Nonformal telah tercantum dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor. 20 tahun 2003 pasal 26 yaitu “Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur pendidikan formal. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”

Berdasarkan penjelasan mengenai Pendidikan Nonformal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Nonformal memiliki peran yang penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Program yang terdapat pada pendidikan nonformal sangat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan belajar masyarakat. Salah satu program Pendidikan Nonformal adalah pendidikan kecakapan hidup. Hal tersebut sejalan dengan yang tertuang dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 16 yaitu “Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.”. Pendidikan kecakapan hidup bertujuan untuk membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan fungsional agar peserta didik mampu hidup mandiri di masyarakat dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka dengan keterampilan fungsional

yang mereka miliki setelah selesai mengikuti program pendidikan kecakapan hidup. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Anwar (2006, hlm. 20) bahwa program pendidikan *life skills* adalah pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat.

Program pendidikan *life skill* merupakan program pendidikan yang membekali warga belajarnya dengan berbagai keterampilan fungsional yang bertujuan agar warga belajar mampu hidup mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya, maka program pendidikan *life skill* hendaknya dirancang sesuai dengan kebutuhan belajar warga belajar, potensi lokal, perkembangan zaman, serta peluang dalam pemanfaatan hasil dari program pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) tersebut dalam usaha peningkatan taraf hidup. Hal tersebut diperkuat oleh Anwar (2006, hlm. 25) bahwa *life skill* yang dipilih hendaknya diyakini dapat menjadikannya mampu mendapatkan penghasilan yang layak. Salah satu bentuk implementasi dari program pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) adalah pelatihan. Pelatihan merupakan salah satu bagian dari satuan pendidikan nonformal, hal tersebut telah disebutkan dalam UU No.20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat (4) yaitu “Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis”. Pelatihan merupakan implementasi dari pendidikan kecakapan hidup yang bertujuan untuk membantu orang lain dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Good (1973) (Marzuki, 2010, hlm. 175) yaitu pelatihan sebagai suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh keterampilan dan pengetahuan. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat (5) dijelaskan bahwa “Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi”.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2015) mengenai pelatihan kecakapan hidup di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa pengelola BLK Kabupaten Sumedang memberikan bekal berupa pengetahuan, keterampilan dalam bekerja, dan berwirausaha sehingga masyarakat dapat memiliki bekal kecakapan hidup yang dibutuhkan di dunia kerja. Hasil dari pelatihan kecakapan hidup ini yaitu adanya kecakapan yang dimiliki oleh peserta seperti kecakapan vokasional, kecakapan akademik, kecakapan sosial dan kecakapan personal.

Program pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) yang diimplementasikan melalui kegiatan pelatihan merupakan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Melalui program *life skill* masyarakat dibekali dengan berbagai macam keterampilan fungsional agar dapat hidup mandiri di masyarakat. Melalui keterampilan fungsional tersebut masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu aplikasi dari hasil belajar pendidikan kecakapan hidup melalui kegiatan pelatihan yaitu memanfaatkan keterampilan fungsional yang telah didapat dengan membuat suatu kegiatan usaha dan menjadi wirausaha. Wirausaha merupakan salah satu bentuk kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, karena seorang wirausaha bebas menentukan strategi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dirinya tanpa intervensi dari pihak lain. Menurut Alma (2009, hlm. 5) wirausahawan adalah seorang inovator, sebagai individu yang mempunyai naluri untuk melihat peluang-peluang, mempunyai semangat, kemampuan dan pikiran untuk menaklukkan cara berpikir lamban dan malas.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Aida (2010) mengenai pengelolaan pelatihan sablon distro dalam meningkatkan kemampuan wirausaha warga belajar paket C di LKP Citra Bahasa dan Sarana Informatika, menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan pelatihan sablon distro warga belajar memiliki keterampilan sablon distro dan menjadi percaya diri untuk bekerja serta melakukan kegiatan wirausaha.

Pada jurnal yang ditulis oleh Lutfiansyah (2009) yang membahas mengenai penerapan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) dalam pemberdayaan

perempuan kepala keluarga (PEKKA) di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak dari kegiatan pendidikan kecakapan hidup yaitu meningkatnya motivasi berwirausaha warga belajar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak orang terdidik, semakin banyak sekolah dan perguruan tinggi yang meluluskan siswa dan mahasiswanya maka semakin meningkat pula tingkat pengangguran. Hal tersebut dikarenakan jumlah lulusan tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, oleh sebab itu maka dirasa perlunya dunia wirausaha. Kegiatan wirausaha sangat penting dalam proses pembangunan, karena pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja karena kemampuan pemerintah sangat terbatas (Alma, 2009, hlm.1). Pentingnya kegiatan wirausaha juga dijurkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh H.R Al-Bazzar (Alma, 2009, hlm.3) bahwa pekerjaan yang paling baik adalah seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki motivasi untuk memulai usaha, hal tersebut terlihat dari jumlah pengusaha di Indonesia yang hanya berjumlah 1.65% dari total penduduk Indonesia (Sasongko, 2015). Padahal idealnya menurut pernyataan yang bersumber dari PBB (Alma, 2009, hlm. 4) bahwa suatu Negara akan mampu membangun apabila memiliki wirausahawan sebanyak 2% dari jumlah penduduknya.

Dalam memulai suatu kegiatan wirausaha, pertama-tama harus adanya motivasi dari setiap individu. Motivasi merupakan faktor pendorong utama dalam memulai suatu kegiatan wirausaha. David Mc Clelland (dalam Alma, 2009) hlm.mengungkapkan bahwa dorongan untuk mencapai keberhasilan merupakan motif yang penting sekali, bukan saja untuk menentukan keberhasilan seseorang namun juga keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Di Amerika ada budaya keinginan seseorang untuk menjadi bos sendiri, memiliki peluang individual, menjadi sukses dan menghimpun kekayaan, ini semua merupakan aspek yang utama dalam mendorong berdirinya kegiatan

kewirausahaan (Alma, 2009, hlm. 6). Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi berwirausaha dapat dibentuk oleh faktor lingkungan yang mendorong kegiatan berwirausaha. Motivasi berwirausaha juga dapat dibentuk di lingkungan pendidikan yang memberikan mata pelajaran kewirausahaan untuk membangun motivasi berwirausaha masyarakat sejak usia muda. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa *entrepreneur are not born-they develop* menurut Hisrich-Peters dalam bukunya yang dikutip oleh Alma (2009, hlm. 7). Berdasarkan pada jurnal yang ditulis oleh Astuti (2007) mengenai pelatihan menjahit dilaksanakan dengan memadukan program-program pelatihan diantaranya program tabungan mandiri, manajemen terapan, pemberdayaan ekonomi, pelatihan menjahit, dan bimbingan Islam intensif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak pelatihan menjahit terpadu pada perubahan kehidupan lulusan setelah mengikuti kegiatan yaitu memiliki keinginan untuk mengimplementasikannya pada kegiatan usaha di bidang busana.

Salah satu kegiatan wirausaha yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia yaitu wirausaha dalam bidang boga atau makanan. Usaha yang bergerak di bidang boga merupakan usaha yang mampu bertahan lama karena setiap manusia membutuhkan makanan setiap harinya. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka aktifitas manusia pun menjadi semakin padat. Hal tersebut membuat manusia memiliki waktu yang terbatas untuk menyiapkan atau memasak makanan sendiri sehingga mereka membutuhkan hal-hal yang bersifat praktis dan efisien untuk memperoleh hidangan makanan. Perkembangan dan keanekaragaman kuliner semakin lama semakin berkembang dan variatif. Aneka jenis kuliner semakin lama semakin beragam mulai dari bentuk, jenis, dan variasi rasa yang diciptakan. Hal tersebut dapat menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk menggeluti bidang usaha kuliner karena semakin hari usaha di bidang kuliner semakin menjanjikan dengan perolehan keuntungan yang cukup banyak. Oleh sebab itu, maka peluang bisnis dalam bidang kuliner sangat diminati masyarakat.

PKBM Jayagiri merupakan salah satu PKBM yang berada di Desa Jayagiri, Lembang. Desa Jayagiri berada di wilayah Desa Jayagiri Kecamatan Lembang

Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah kurang lebih 974.066 hektar, jumlah penduduk kurang lebih 16.539 jiwa tersebar di 16 Rukun Warga dan 68 Rukun Tetangga. Mata pencaharian penduduk umumnya petani, pedagang, peternak, penyedia layanan jasa dan pegawai. Kondisi wilayah Desa Jayagiri merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 1200 meter dari permukaan air laut dengan curah hujan antara 2000/4000 mm/tahun, suhu udara berkisar antara 14-24 derajat celcius.

Desa Jayagiri termasuk desa di kecamatan Lembang dengan jarak antar desa ke desa cukup dekat. Berada di bawah kaki Gunung Tangkuban Perahu serta berbatasan dengan wilayah hutan Desa Jayagiri di sebelah utara, Desa Lembang di sebelah selatan, Desa Cikahuripan di sebelah barat, dan Desa Cibogo di sebelah timur. Aksesibilitas yang dimiliki oleh Desa Jayagiri sudah cukup baik, meliputi akses berupa jalan yang menghubungkan Desa Jayagiri dengan wilayah lain, dan fasilitas pendidikan berupa sekolah SD, SMP, dan SMK. Namun masih terdapat beberapa wilayah di Desa Jayagiri yang memiliki akses minim dan berada di wilayah yang sulit dijangkau. Hal tersebut berimbas pada sektor pendidikan, budaya, dan ekonomi wilayah tersebut. Dengan keterbatasan akses dan kondisi geografis membuat masyarakat kesulitan dalam pemerolehan pendidikan. Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah juga menjadi faktor pendukung rendahnya tingkat pendidikan di wilayah tersebut. Sebagian besar masyarakat di Desa Jayagiri berprofesi sebagai ibu rumah tangga, petani, peternak, penyedia layanan jasa seperti kuli bangunan, tukang ojek, dan pekerja kasar.

Berawal dari kondisi masyarakat tersebut, maka PKBM Jayagiri menyelenggarakan program-program pendidikan nonformal yang didasari pada kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh Desa Jayagiri. Salah satu program pendidikan yang diselenggarakan ialah pelatihan tata boga. Pelatihan tata boga di PKBM Jayagiri merupakan salah satu upaya untuk memandirikan masyarakat dengan memberikan keterampilan fungsional berupa keterampilan tata boga dan kewirausahaan. Dengan pemberian keterampilan tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih mandiri dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat harus

diiringi dengan motivasi dari masyarakat tersebut untuk berkembang. Motivasi masyarakat untuk berkembang dapat diwujudkan melalui penerapan hasil belajar berupa keterampilan yang diperoleh melalui kegiatan pelatihan dengan membuka kegiatan wirausaha. Mengingat lokasi PKBM Jayagiri yang berada di kawasan wisata Lembang yang merupakan kawasan strategis dalam menjalankan kegiatan wirausaha.

Lembang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Barat yang banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berasal dari berbagai daerah. Wisatawan yang datang ke Lembang tidak hanya berasal dari sekitar Bandung saja, tetapi juga kota-kota lain di Jawa Barat bahkan Jakarta. Hal tersebut membuat Lembang menjadi salah satu daerah bisnis pariwisata yang cukup berkembang. Dengan melihat kondisi tersebut, banyak masyarakat yang memanfaatkannya sebagai suatu peluang usaha seperti usaha kuliner, hotel, penginapan, dan penyediaan akomodasi untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan. Dengan melihat peluang tersebut, pengelola PKBM Jayagiri menyelenggarakan pelatihan tata boga kepada masyarakat di lingkungan PKBM yang berorientasi pada kegiatan wirausaha. Tujuan dari pelatihan tersebut ialah untuk membekali warga belajar dan masyarakat dengan pengetahuan, dan keterampilan fungsional di bidang pengolahan makanan berbasis usaha. Keterampilan fungsional tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh warga belajar dan masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi serta kesejahteraan hidup mereka.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di PKBM Jayagiri, maka diperoleh informasi bahwa PKBM Jayagiri merupakan PKBM yang dikenal dengan sentra kreasi kuliner dengan program pelatihan tata boga yang menjadi program unggulan. Hal tersebut membuat PKBM Jayagiri seringkali dipercaya untuk menjadi pelaksana kegiatan pelatihan tata boga yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat. Pengelola PKBM juga rutin mengadakan kegiatan pelatihan kreasi boga bersama dengan masyarakat di lingkungan PKBM. Kegiatan pelatihan ini diadakan setiap minggu selama dua kali pertemuan setiap minggunya. Dalam pelatihan ini warga belajar tidak hanya dibekali dengan keterampilan mengolah makanan tetapi juga

bagaimana mengemas makanan agar terlihat menarik, serta strategi pemasaran produk dari hasil pelatihan tersebut. Hasil produk dari kegiatan pelatihan tata boga di PKBM Jayagiri seringkali diikutsertakan dalam pameran-pameran dan dipasarkan melalui berbagai macam kegiatan seperti bazaar, pameran, toko online dan dititipkan ke berbagai warung. Melalui kegiatan tersebut, produk yang dihasilkan oleh warga belajar pelatihan tata boga PKBM Jayagiri menuai respon yang cukup positif di masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan terpilihnya hasil karya boga PKBM Jayagiri sebagai juara satu pada pameran Pendidikan Nonformal tingkat nasional pada tahun 2015 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Berdasarkan studi pendahuluan tersebut menunjukkan bahwa program pelatihan tata boga di PKBM Jayagiri memiliki kredibilitas yang cukup baik di masyarakat. Program pelatihan tata boga merupakan program pelatihan terpadu yang berorientasi pada kegiatan usaha. Pada dasarnya suatu program dapat dikatakan berhasil apabila tujuan program tersebut dapat tercapai dan hasil dari kegiatan pelatihan tersebut memberikan dampak positif pada perubahan hidup warga belajar setelah mengikuti pelatihan. Dalam hal ini, tujuan dari pelatihan tata boga adalah membekali masyarakat dengan keterampilan tata boga dan kewirausahaan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha. Namun, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya motivasi dari tiap individu masyarakat tersebut untuk maju dan berkembang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian yang berjudul “**Proses dan Dampak Program Pelatihan Tata Boga terhadap Motivasi Berwirausaha Warga Belajar**”, studi penelitian ini yaitu pada program pelatihan tata boga PKBM Jayagiri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, selanjutnya penulis akan memaparkan permasalahan penelitian yang diidentifikasi. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini ialah:

Pudji Setyarini, 2016

PROSES DAN DAMPAK PROGRAM PELATIHAN TATA BOGA TERHADAP MOTIVASI BERWIRSAUSAHA WARGA BELAJAR

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Pendidikan terakhir tutor pada program pelatihan tata boga di PKBM Jayagiri adalah SMA, namun para tutor seringkali mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensi mereka.
2. Pelatihan tata boga merupakan program unggulan yang diselenggarakan oleh PKBM Jayagiri.
3. Warga belajar pada program pelatihan tata boga didominasi oleh ibu rumah tangga.
4. Manfaat dari kegiatan pelatihan belum bisa dirasakan secara langsung karena belum adanya kemitraan yang dijalin oleh PKBM Jayagiri untuk pemasaran produk hasil kegiatan pelatihan tata boga sehingga kegiatan pemasaran produk masih bersifat konvensional yaitu melalui kegiatan bazaar, pameran, online, dan warung-warung terdekat

Berdasarkan hasil identifikasi masalah penelitian tersebut maka penulis merumuskan masalah tersebut ke dalam pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana proses pelatihan tata boga dalam upaya menumbuhkan motivasi berwirausaha warga belajar di PKBM Jayagiri?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh PKBM Jayagiri dalam menyelenggarakan program pelatihan tata boga?
3. Bagaimana dampak program pelatihan tata boga terhadap motivasi berwirausaha warga belajar setelah mengikuti kegiatan pelatihan di PKBM Jayagiri?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang didapat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan proses pelatihan tata boga dalam upaya menumbuhkan motivasi berwirausaha warga belajar di PKBM Jayagiri.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh PKBM Jayagiri dalam menyelenggarakan program pelatihan tata boga.

3. Mengetahui dampak program pelatihan tata boga terhadap motivasi berwirausaha warga belajar setelah mengikuti kegiatan pelatihan di PKBM Jayagiri.

E. Manfaat Penelitian

Dalam menulis sebuah penelitian, penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis. Maka dalam menulis penelitian ini, manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa pengembangan konsep teori yang berkaitan dengan Pendidikan Luar Sekolah khususnya program Pendidikan Kecakapan Hidup, dan Pelatihan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pendidikan Luar Sekolah, khususnya Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pelatihan.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis dalam kegiatan pengembangan program Pendidikan Luar Sekolah khususnya Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pelatihan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan bahan rujukan untuk kegiatan evaluasi penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Hidup melalui kegiatan pelatihan terkait dengan upaya menumbuhkan motivasi berwirausaha warga belajar.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Pada penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis merujuk pada adalah sebagai berikut (UPI, 2015):

BAB I Pendahuluan : Pada bab ini didalamnya memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka : Pada bab ini didalamnya memuat tentang landasan teori dan konsep yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang dikaji, penelitian yang relevan, dan kerangka pemikiran. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsep pendidikan kecakapan hidup, konsep pelatihan, implementasi pendidikan kecakapan hidup melalui pelatihan, teori

motivasi, konsep kewirausahaan, dan konsep pelatihan tata boga sebagai program pendidikan luar sekolah.

BAB III Metode Penelitian : Pada bab ini didalamnya memuat tentang desain penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Pada bab ini didalamnya memuat tentang deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup : Pada bab ini didalamnya memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dan rekomendasi dari hasil temuan yang didapat dalam penelitian.